

# Proses Penerbitan Grosse Akta Kapal di KSOP Khusus Batam pada PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam

*by* Jusdi Simarmata

---

**Submission date:** 06-Nov-2024 01:24PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2510159862

**File name:** JURMA\_VOL\_1\_NO\_4\_DESEMBER\_2023\_HAL\_429-436.pdf (596.74K)

**Word count:** 2534

**Character count:** 15203

## Proses Penerbitan *Grosse Akta Kapal* di KSOP Khusus Batam pada PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam

Jusdi Simarmata<sup>1\*</sup>, Fadiyah Hani Sabila<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

Korespondensi penulis: [jusdiyandisimarmata@gmail.com](mailto:jusdiyandisimarmata@gmail.com)\*

**Abstract.** This paper aims to find out the process of issuance of *grosse deed of vessel* at KSOP Khusus Batam and to find out the document requirements attached to the issuance of *grosse deed of vessel*. The methods used in this research are field research and library research. The process of issuance of ship deed *grosse* at KSOP Khusus Batam is conducted through procedures and requirements that have been set. It aims to ensure the validity and legality of ship ownership in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations. The results of the research in the discussion of the problem of the process of issuing the ship's deed *grosse* are regulated in PM No. 39 of 2017 concerning Registration and Nationality of Ships authorised by the Minister of Transportation. The process of issuing *Grosse Deed of Ship* at KSOP Khusus Batam at PT Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam has been done well but there are still obstacles, namely the error in uploading attachment documents on the ship registration application system so that it causes the submission to be revised, as well as in bringing and checking the physical requirement documents at the time of physical file validation at KSOP Khusus Batam.

**Keywords:** Ship, *Grosse Deed*, Issuance

**Abstrak.** Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerbitan *grosse akta kapal* di KSOP Khusus Batam serta mengetahui syarat dokumen yang dilampirkan untuk penerbitan *grosse akta kapal*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan lapangan (*field research*) dan pengamatan perpustakaan (*library research*). Proses penerbitan *grosse akta kapal* di KSOP Khusus Batam dilakukan melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan validitas dan legalitas kepemilikan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dalam pembahasan masalah tentang proses penerbitan *grosse akta kapal* yang diatur dalam PM Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal yang disahkan oleh Menteri Perhubungan. Proses penerbitan *Grosse Akta Kapal* di KSOP Khusus Batam pada PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam telah dilakukan dengan baik tetapi masih terdapat kendala yaitu adanya kesalahan mengunggah dokumen lampiran pada sistem aplikasi pendaftaran kapal sehingga menyebabkan pengajuan direvisi, maupun dalam membawa dan mengecek dokumen persyaratan fisik pada saat validasi berkas fisik di KSOP Khusus Batam.

**Kata kunci:** Kapal, *Grosse Akta*, Penerbitan.

### 1. LATAR BELAKANG

Setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harus terdaftar dalam sistem pendaftaran kapal nasional. Para pemilik kapal diwajibkan mendaftarkan kapalnya untuk mendapatkan status kepemilikan yang sah, sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM 39 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dari peraturan tersebut, kapal yang sudah terdaftar akan mendapatkan dokumen *grosse akta pendaftaran* yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan resmi. *Grosse akta kapal* adalah dokumen resmi yang dikeluarkan sebagai bagian dari proses pendaftaran kapal. Dokumen ini diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan merupakan bukti sah kepemilikan kapal.

Untuk mendapatkan grosse akta di KSOP Khusus Batam, pemilik kapal harus melalui beberapa tahap dan memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM 39 Tahun 2017. Seseorang yang memiliki grosse akta secara hukum dianggap sebagai pemilik sah dari kapal yang tercantum dalam dokumen tersebut.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### a. Pengertian Proses

Berdasarkan KBBI, proses dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan atau tahapan pengolahan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk yang diinginkan.

### b. Pengertian Penerbitan

Mengutip dari Kustadi Suhandang (2016:73), penerbitan merupakan kegiatan menciptakan konten berupa tulisan dan/atau gambar yang akan disebarluaskan ke masyarakat. Dalam prosesnya, tim editor berperan penting dalam memilih dan menyiapkan materi yang akan dicetak, hingga mengolahnya menjadi bahan bacaan yang siap dipublikasikan.

### c. Pengertian Kapal

Menurut KUHD Pasal 309, kapal didefinisikan sebagai segala jenis dan bentuk perahu. Jika tidak ada ketentuan atau perjanjian khusus, pengertian kapal mencakup semua peralatan yang ada di dalamnya. Peralatan yang dimaksud adalah barang-barang yang walaupun bukan bagian utama dari kapal, tetapi secara permanen digunakan bersama kapal tersebut.

### d. Pengertian Grosse Akta

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Grosse Akta merupakan salinan resmi dari minut akta, di mana minut akta adalah dokumen akta yang asli.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 1 angka 11, Grosse Akta didefinisikan sebagai salinan akta pengakuan hutang yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial, dengan mencantumkan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada bagian kepalanya.

### e. Pengertian KSOP

Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah lembaga teknis di bawah Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

#### **f. Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik (SPKE)**

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM 39 Tahun 2017, Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik (SPKE) dijelaskan sebagai sistem berbasis teknologi informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal untuk melayani pendaftaran kapal secara elektronik.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **1. Penelitian Lapangan**

Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan pengamatan secara langsung selama periode 6 bulan. Selama pengamatan, penulis mencatat berbagai kondisi dan perilaku dari objek yang diteliti. Penulis terlibat langsung dalam aktivitas yang berkaitan dengan Proses Penerbitan Grosse Akta Kapal di KSOP Khusus Batam, yang dilakukan di PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam.

#### **2. Studi Pustaka**

Studi pustaka merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber informasi tertulis yang tersedia di perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dan dokumen-dokumen terkait untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Proses Penerbitan Grosse Akta Kapal Di KSOP Khusus Batam pada PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam**

##### **1. Prosedur Pengajuan Permohonan Grosse Akta Kapal Melalui Online**

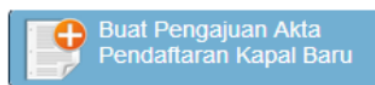
Proses pengajuan grosse akta kapal dapat dilakukan secara online melalui website :<https://kapal.dephub.go.id/> Adapun langkah - langkah pengajuan akta adalah sebagai berikut ini:

##### **a) Masuk ke Sistem Akta Pendaftaran Kapal**

Pemohon (baik pemilik maupun bukan pemilik kapal) harus membuat akun pengguna terlebih dahulu sebelum bisa masuk ke aplikasi Pendaftaran Kapal.

##### **b) Membuat Pengajuan Baru**

Pemohon dapat memulai proses pengajuan Akta Pendaftaran Kapal dengan mengklik tombol yang tersedia di sub menu untuk membuka halaman pengajuan.



- c) Mengisi Data Permohonan Pemohon perlu mengisi informasi dasar seperti:
- Tempat surat permohonan
  - Nama pemohon
  - Lokasi pendaftaran
  - Nomor surat permohonan
  - Status pemohon (bukan pemilik kapal)
  - Bukti kepemilikan kapal (untuk kapal produksi dalam negeri/GALANGAN) Setelah selesai, klik "simpan dan lanjutkan"
- d) Melengkapi Informasi Pemilik  
Isi data pemilik dan penghadap, lalu klik "simpan dan lanjutkan"
- e) Mengisi Detail Kapal Masukkan informasi lengkap tentang kapal, meliputi:
- Surat Ukur & Data Pembangunan
  - Dimensi
  - Konstruksi dan Mesin
  - Spesifikasi Daya Mesin Setelah selesai, klik "lanjutkan"
- f) Mengunggah Dokumen  
Unggah semua berkas persyaratan yang diminta dengan mengklik "Upload Berkas", kemudian pilih "Lanjutkan"
- g) Meninjau dan Mengirim Permohonan
- Periksa ulang semua data yang telah dimasukkan
  - Klik "Kirim Permohonan" untuk menyelesaikan pengajuan
  - Sistem akan mengirim notifikasi email ke petugas operator kantor tujuan
  - Petugas akan memverifikasi kelengkapan berkas
  - Jika ada yang perlu diperbaiki, pemohon dapat melihat catatan revisi di sub menu revisi akta pendaftaran

## **2. Validasi Berkas Fisik di Kantor KSOP Khusus Batam**

Setelah diverifikasi via aplikasi oleh petugas, pemohon mendapatkan email untuk membawa berkas fisik ke kantor KSOP Khusus Batam.

- a. Pemohon harus membawa berkas fisik yang telah diverifikasi secara online ke kantor KSOP Khusus Batam.
- b. Petugas akan melakukan validasi dengan memeriksa kesesuaian antara berkas fisik dengan berkas yang telah diunggah secara online.

c. Jika berkas fisik dinyatakan sesuai, maka proses penerbitan *grosse* akta kapal bangunan baru dapat dilanjutkan.

d. Proses validasi berkas fisik ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan dokumen yang diajukan.

Setelah itu pihak KSOP Khusus Batam akan melakukan penyusunan minut dan *grosse* akta kapal.

### **3. Pembayaran Biaya Penerbitan atau PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)**

Pembayaran *billing* PNBP dilakukan dua tahap yaitu tahap 1 pembayaran *billing* pemeriksaan teknis dokumen dan tahap 2 pembayaran *billing* penerbitan surat tanda kebangsaan kapal. Pembayaran *billing* PNBP dapat dilakukan melalui aplikasi pendaftaran kapal dan masa berlaku *invoice* adalah 2 hari.

Berikut ini parafrasa dari daftar biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diperlukan:

- a) Untuk pemeriksaan dokumen teknis yang meliputi:
  - Akta pendaftaran kapal
  - Akta balik nama kapal
  - Akta hipotek kapal
  - Akta pengalihan hipotek kapal
  - Grosse akta pengganti
  - Biaya yang dikenakan adalah Rp 150.000 per kapal
- b) Untuk penerbitan surat tanda kebangsaan kapal, biaya yang dikenakan per surat berdasarkan ukuran kapal (GT/Gross Tonnage):
  - 1) Kapal ukuran 7-100 GT: Rp 1.000.000
  - 2) Kapal ukuran lebih dari 100 sampai 500 GT: Rp 250.000
  - 3) Kapal ukuran lebih dari 500 sampai 1.500 GT: Rp 1.000.000
  - 4) Kapal ukuran lebih dari 1.500 sampai 5.000 GT: Rp 2.500.000
  - 5) Kapal ukuran lebih dari 5.000 sampai 10.000 GT: Rp 4.000.000
  - 6) Kapal ukuran lebih dari 10.000 sampai 20.000 GT: Rp 7.000.000
  - 7) Kapal ukuran lebih dari 20.000 sampai 30.000 GT: Rp 10.000.000
  - 8) Kapal ukuran lebih dari 30.000 sampai 40.000 GT: Rp 15.000.000
  - 9) Kapal ukuran lebih dari 40.000 sampai 50.000 GT: Rp 20.000.000
  - 10) Kapal ukuran lebih dari 50.000 GT: Rp 30.000.000

#### 4. Jadwal Tanda Tangan Minut Akta

Setelah penyusunan minut akta dan *grosse* akta selesai maka pihak KSOP akan mengirimkan draft minut akta kepada pemohon untuk diberikan ke pemilik kapal untuk mengetahui kebenaran dari minut akta. Setelah itu petugas KSOP akan menjadwalkan tanda tangan minut akta yang akan ditanda tangani oleh pemilik kapal atau oleh penghadap yang dikuasakan pemilik kapal. Akta pendaftaran kapal ditandatangani oleh pemilik kapal atau yang dikuasakan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dan Pegawai Pembantu Pendaftaran Balik Nama. Setelah akta pendaftaran kapal ditandatangani harus dibuatkan daftar induk paling lama 24 jam setelah akta ditandatangani.

#### 5. Penerbitan Grosse Akta

Setelah mendaftarkan kepemilikan kapal, pemilik akan menerima Grosse akta pendaftaran yang merupakan copy dari dokumen asli (minut) akta pendaftaran. Dokumen ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

Setelah pemilik menerima Grosse akta, kapal harus dipasang tanda pendaftaran. Tanda ini terdiri dari kombinasi angka dan huruf yang memuat beberapa informasi:

- Tahun kapal didaftarkan
- Kode pengukuran dari lokasi pendaftaran
- Nomor urut dalam akta pendaftaran
- Kode kategori pendaftaran kapal

Tanda pendaftaran ini wajib dipasang secara permanen di kapal, tepatnya di bagian luar dinding depan bangunan atas atau di lokasi lain yang aman dan mudah terlihat.

#### Syarat - Syarat Dokumen Pengurusan Grosse Akta Kapal

1. Surat permohonan penerbitan *grosse* akta kapal dari pemilik kapal.
2. Surat kuasa yang diberikan oleh pemilik kapal kepada penghadap.
3. Surat ukur.
4. Kontrak pembangunan kapal.
5. Berita acara serah terima kapal.
6. Surat keterangan galangan (*BUILDER CERTIFICATE*).

7. Akta pendirian / atau akta perubahan anggaran dasar yang dibuat dihadapan notaris yang dapat menunjukkan susunan direksi / komposisi saham terakhir serta telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemilik kapal yang merupakan perusahaan disertai dengan profil perusahaan dari instansi terkait.
8. Kartu tanda penduduk direktur perusahaan.
9. Kartu tanda penduduk penghadap.
10. Profil perusahaan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan, Penghadap dan Direktur.

#### **Kendala - Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penerbitan *Grosse Akta Kapal***

1. Permohonan Secara Online
  - a. Jaringan yang tidak stabil sehingga *server error* membuat pengajuan menjadi terkendala.
  - b. Kesalahan mengunggah dokumen yang dilampirkan pada sistem aplikasi pendaftaran sehingga mengakibatkan pengajuan direvisi.
2. Validasi Berkas Fisik di Kantor KSOP Khusus Batam

Kurangnya berkas dan keaslian dokumen yang dibawa pada saat validasi berkas fisik di kantor KSOP Khusus Batam menjadikan proses penerbitan terkendala.

#### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Proses Penerbitan *Grosse Akta Kapal* di KSOP Khusus Batam pada PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam telah dilakukan dengan baik yaitu dengan mengajukan permohonan akta pendaftaran kapal melalui website: <https://kapal.dephub.go.id/>, melakukan validasi berkas fisik di KSOP, pembayaran pajak PNBPN, penandatanganan minut akta, dan pemasangan tanda pendaftaran ke badan kapal sebagai bukti pendaftaran yang sah. Tetapi masih terdapat beberapa kendala yang dialami pemohon saat melakukan pengajuan pendaftaran kapal yaitu adanya kesalahan mengunggah dokumen yang akan dilampirkan pada aplikasi pendaftaran kapal sehingga mengakibatkan pengajuan direvisi dan pihak pemohon kurang teliti dalam menyiapkan dokumen yang akan dibawa untuk validasi berkas fisik di KSOP Khusus Batam.

#### **DAFTAR REFERENSI**

1. Berutu, R., & Sabila, F. H. (2024). System for Management of Sign on Ship Crew Sealing Books at the Batam KSOP Office at PT. Putra Anambas Shipping Batam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 1(2), 256-261.



- 10  
Haerani, H., & Ulum, H. Kewenangan Syahbandar Dalam Pembebanan Dan Pembuatan Akta Hipotek Kapal Laut. *Unizar Law Review (ULR)*, 4(1), 2021
- 19  
Hamka, H., Prosedur Pendaftaran Kapal Untuk Memenuhi Aspek Kelaiklautan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari. In *Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Vol. 4, pp. 1-8)*, 2021
- 3  
Hana, N. A., Parameshwara, P., & Fadlan, F. Analisis Yuridis Terhadap Proses Pendaftaran Kapal Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Status Kapal Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. *Jurnal Syntax Fusion*, 2(12), (2022): 901-915
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017
- Pasaribu, L. U. R. E., Dirhamsyah, D., & Sabila, F. H. (2023). Process Clearance In & Clearance Out Millennium 806 Use the Application B-SIM by PT. Putra Samudera Inti in the Area Free Trade Zone Batam. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1(4), 403-410.
- 2  
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Kapal dan Kebangsaan Kapal.
- Sabila, F. H., & Cahyadi, W. D. Y. (2024). Analysis of Existing Constraints During Loading and Unloading of Goods at Belawan Port by PT. Gelora Perkasa. *Applied Business and Administration Journal*, 3(03), 15-22.
- 11  
Saragih, R. R., Ridho, S., Danilwan, Y., & Sabila, F. H. (2024). Proses Penanganan Clearance Out Kapal Ternak Berbendera Asing Dengan Inaportnet Oleh Pt. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan. *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumihan, Ilmu Perkapalan*, 2(1), 140-146.
- Sianturi, P. S., & Sabila, F. H. (2024). The Influence Of Manual System Port Services To Inaportnet On Users Of Belawan Port Services At PT. Adhigana Pratama Mulya Belawan. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(1), 17-28.
- Suhandang Kustadi. *Pengantar Jurnalistik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2016
- 28  
Undang Undang No.3 Tahun 2017 Tentang Perbukuan Penerbitan
- 8  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

# Proses Penerbitan Grosse Akta Kapal di KSOP Khusus Batam pada PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jurnal.poltekpelsulut.ac.id">jurnal.poltekpelsulut.ac.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://jurnal.penerbitsign.com">jurnal.penerbitsign.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://ejournal.areai.or.id">ejournal.areai.or.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://ejournal.stiepancasetia.ac.id">ejournal.stiepancasetia.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://dianaanitakristianti.blogspot.com">dianaanitakristianti.blogspot.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://journal.universitaspahlawan.ac.id">journal.universitaspahlawan.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://eprints.pknstan.ac.id">eprints.pknstan.ac.id</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://jurnal.untagsmg.ac.id">jurnal.untagsmg.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://journal.arimbi.or.id">journal.arimbi.or.id</a> Internet Source	1 %
12	Prabowo, Hertanto Adi. "Efektivitas perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam sengketa tanah dengan obyek jaminan hak tanggungan di Bpn Banjarnegara", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
13	<a href="http://politanisamarinda.ac.id">politanisamarinda.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	Bustanuddin Bustanuddin, Dasril Radjab. "Formulasi Peraturan Desa Tentang Lubuk Larangan", Journal of Political Issues, 2021 Publication	<1 %
16	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
17	<a href="http://digilib.unimed.ac.id">digilib.unimed.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	<1 %

19	<a href="http://journal.stiemb.ac.id">journal.stiemb.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://gsen.sfedu.ru">gsen.sfedu.ru</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://ejurnal.ung.ac.id">ejurnal.ung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://jurnalmaritim.com">jurnalmaritim.com</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://m.radarbangka.co.id">m.radarbangka.co.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://pasopatiproject.id">pasopatiproject.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://penerbitselarasmediakreasindo.com">penerbitselarasmediakreasindo.com</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id">www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://www.medanbisnisdaily.com">www.medanbisnisdaily.com</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      Off